

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI
KABUPATEN DHARMASRAYA**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

SKRIPSI

Pembimbing:

**Dr. Aidinil Zetra, MA
Dewi Anggraini, SIP, MSi**

Oleh:

Elant Firdaus

1210833001



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

ABSTRAK

Elant Firdaus, 1210833001, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Andalas Padang. Dengan Judul Skripsi :”pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Dharmasraya”. Dibimbing oleh Dr. Aidinil Zetra, MA dan Dewi Anggraini, SIP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 113 Halaman, Dengan Referensi Buku Teori dan Metode 25, dokumen 7, dan internet 6.

Dalam konteks sumber daya alam, hak menguasai negara yang dimaksud adalah hak negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana termaktum Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam Pasal 4 diatur bahwa: Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. di Kabupaten Dharmasraya pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sebagai sumber. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Penelitian menggunakan teori pengawasan di lihat dari waktu pengawasan yakni *Preventif dan Represif*. Sesuai hasil penelitian pengasawan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dharmasraya telah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Perda Pertambangan serta Surat keputusan Bupati, dimana pengawasan *Preventif* telah dilakukan dengan membentuk Pokja Sosialisasi sedangkan *Represif* dengan membentuk Pokja penindakan. Namun masih adanya kendala kendala dilapangan seperti masih kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya PETI, dampak yang ditimbulkan pasca penambangan, jauhnya medan yang harus di tempuh, bocornya razia dilokasi PETI, dijual bebasnya peralatan yang digunakan untuk penambangan, kurang tegas pemerintah dalam memberantas PETI serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah. Seharusnya ini semua menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pokja Sosialisasi, Pokja Penindakan serta masyarakat agar kegiatan PETI dapat di hentikan secara menyeluruh.

Kata Kunci : Hak Menguasai Negara, *Preventif, Represif*.

ABSTRACT

Elant Firdaus, 1210833001, majoring Political Science, Faculty Social and Political Science – Padang Andalas University. With the title of the thesis “Supervision of Regional Government in Gold Mining Activities without Permits in Dharmasraya Regency”. Guided by Dr. Aidinil Zetra, MA and Dewi Anggraini, SIP, M.Sc.

In the context of natural resources, the Nation right to control is the right to control of the earth, water, and space as stipulated in article 33 paragraph 3 of 1945 constitution that “the earth, water and the wealth contained in it are controlled by the nation and used for the greatest prosperity of the people”. According to 2009 constitution no 4 about Mineral and Coal Mining (MINERBA). In article 4 it is regulated that : Mineral and Coal as non-renewable natural resources is national wealth controlled by the Nation for the greatest possible welfare of the people organized by the Government and / or Regional Government. In Dharmasraya regency, mining is regulated in regional regulation number 19 of 2007 about Management and Exploitation of Mining and Energy. In this study, the researcher used qualitative methods with descriptive. Data collecting techniques used interviews and documentation. While the data validity used triangulation as source. The selection of informants was done by purposive sampling. The research use the theory of Supervision seen from the time of supervision that is Preventive and Repressive. According to the result of study, the supervision carried out by the regional government of Dharmasraya was in accordance with what had been ordered by the mining local regulation (PERDA) and Bupati’s decree, where preventive supervision had been carried out by forming socialization work group (POKJA) while repressive by forming action work group. However, there are still obstacle in the field, such as the lack of awareness from the public about the danger of unlicensed mining (PETI), the impact caused by post-mining, the field distance that must be taken, the leaking of raids on the location of unlicensed mining (PETI), the free sale of equipment used for mining, the lack of firmness of the government in eradicating unlicensed mining (PETI) and the lack of coordination between land owners and the Regional government. This should be shared responsibility between the local government, socialization working groups, legal action groups (POKJA), and the public so that unlicensed mining (PETI) activities can be stopped completely.

Key words : Nation control, preventive, repressive rights.